

**PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH***

SKRIPSI

Oleh
Celsie Aprilla Coppiens
NIM. 05010421005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Celsie Aprilla Coppiens
NIM	:	05010421005
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul	:	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> .

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



Celsie Aprilla Coppiens
NIM. 05010421005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Celsie Aprilla Coppiens
NIM. : 05010421005
Judul : Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada
Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Dalam
Perspektif Siyasah Dusturiyah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Februari 2025
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Celsie Aprilla Coppiens

NIM. : 05010421005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji III

Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.SI

NIP. 197911052007011019

Penguji IV

Ibnu Mardivanto, M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 18 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Celsie Aprilla Coppiens
NIM : 05010421005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : celsie.aprilla.coppiens@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENERBITAN KIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA

ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2025

Penulis



(CELSIE APRILLA COPPIENS)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penerbitan izin usaha pertambangan ditujukan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dengan mekanisme perizinan yang berbeda-beda. Badan usaha swasta dapat mengajukan izin usaha pertambangan melalui sistem pelangan dan untuk BUMN dan badan usaha milik daerah, izin dapat diberikan melalui penawaran prioritas dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baru-baru ini, Pemerintah melegalkan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus yang tak hanya diberikan kepada BUMN dan badan usaha milik daerah, tetapi juga kepada badan usaha milik Ormas keagamaan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana bentuk penawaran WIUPK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 kepada Ormas Keagamaan; dan keabsahan penerbitan izin usaha pertambangan khusus kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan dalam perspektif *Siyāṣah Dustūrīyah*.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dengan metode penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan isu penelitian (*statute approach*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai penerbitan izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha milik Ormas keagamaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yakni *Siyāṣah Dustūrīyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan merupakan wujud atribusi yang diberikan langsung oleh UU Minerba kepada Pemerintahan Pusat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba. Kedua, kewenangan pemerintahan pusat untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik Ormas keagamaan adalah sah dan sejalan dengan konsep *Wizarah* (Kementerian) dalam sistem pemerintahan Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, untuk menciptakan perusahaan tambang yang ideal, Menteri ESDM sebagai wakil pemerintah harus konsisten menjalankan proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menjamin kelestarian lingkungan, badan usaha milik Ormas keagamaan harus dapat menyeimbangkan ketentuan hukum positif, dan prinsip-prinsip syariah, terutama prinsip produksi, distribusi, dan pelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah dapat menetapkan bahwa ketentuan syarat penerbitan izin usaha pertambangan khusus bagi BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta juga berlaku bagi badan usaha milik Ormas keagamaan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONSEP PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA ORMAS KEAGAMAAN MENURUT <i>SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i>	27
A. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan.....	27
B. Konsep Perizinan	33
C. Izin Usaha Pertambangan	40
D. Teori Keadilan Distributif.....	42

E. <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	46
BAB III PENAWARAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN	54
A. Mekanisme Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	54
B. Penawaran WIUPK Kepada Badan usaha milik Ormas keagamaan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	64
BAB IV ANALISIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS KEPADA BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i>	73
A. Analisis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Ormas keagamaan Menurut Hukum Positif	73
1. Wewenang.....	79
2. Substansi	88
3. Prosedur	89
B. Analisis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pengelolaan SDA Oleh Ormas keagamaan Dalam Perspektif <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	91
1. Analisis Penerbitan Izin oleh Menteri Dalam Konsep <i>Wizarah</i>	91
2. Prinsip Ormas keagamaan sebagai <i>Hai'ah al-Mujtama'</i>	94
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	118

DAFTAR PUSTAKA

BUKU;

- Abdul Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996.
- Ahmad Mukhtâr `Abd al-Hamîd `Umar. *Mu`jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu`âshirah*. Juz 2. Irbid: `Alam al-Kutub, 2008.
- Ahmadie Thoha. *Muqaddimah Ibn Khaldun (Terjemahan)*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Darmansyah, Aris, Nur Fajriah Siregar, Cecep Khairul Anwar, Khamami Zada, Marcelino Poluakan, Abu Nasir, Dewi Supalah, dan Rizal Rabas. *Model Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama*. 1 ed. Jakarta Pusat: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.
- Dedi Supriyanto, Azaria Indra Wardhana, Muhtadi Saputra, Cecilia Margareth, dan Iskak Aji. "Grand Strategy: Mineral dan Batubara (Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju)." Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Haryadi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka: UBB Press, 2018.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- I Nyoman Gede Remaja. *Hukum Administrasi Negara*. Buleleng: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, dan Rahmi Syahriza. *Hadis-Hadis Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab (Terjemahan)*. 3 ed. Jakarta Timur: KHALIFAH (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2010.
- Jubair Situmorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- M. Noor. KH. Hasyim Asy'ari: *Modernisasi NU dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2010.
- Marbun dan Mahfud. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Marzuki. *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Mayor Jenderal TNI Dr. Budi Pramono, Prof. apt. Muchtaridi, Dr. Hadi Pajarianto, dan Dr. Andi Tenri Somp. *Implementasi Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Menuju Indonesia Emas 2045*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2022.
- Minerba, Warta. "Mineral dan Batubara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Agustus 2011.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Nejatullah Sidiqqi. "Islamic Producer Behavior." 139. Malaysia: Kulliyah of Economics and Management IIU, 1999.
- Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mahradi. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Pertama. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021.

- Nur Yanto. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 12 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. 1 ed. Yogyakarta: UI Press, 2004.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sushanty, Vera Rimbawani. *Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press, 2020.
- Suyuti Pulungan. *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Sharon Beder. *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction Earthscan*. Edisi Pertama. London: Earthscan, 2006.
- Sjamsuduha. *Pengantar Sosiologi Islam, Pencerahan Baru Tatanan Masyarakat Muslim*. Surabaya: JP BOOKS, 2008.
- Stephen C. Wright dan Gregory D. Boese. "Meritocracy and Tokenism." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 2015.
- W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Y. Sri Pudyatmoko. *Perizinan (Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

ARTIKEL JURNAL;

- Adha, Ahmad Faizal. "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam." *Moderate el-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (Januari 25, 2022). Diakses Januari 17, 2025. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030>.
- Adib Shururi. "Keadilan Distributif Pengelolaan Rantai Suplay Hulu Migas Perspektif Al-Quran." Skripsi Universitas PTIQ Jakarta, 2023. Diakses November 25, 2024. <https://repository.ptiq.ac.id/eprint/1287/1/2023-ADIB%20SHURURI-2020.pdf#page=71.38>.

- Adinda Agis Fitria Cahyani. "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 11 (September 2023): 8–9.
- Ananda Saadatul Maulidia. "Penilaian Keadilan Distributif Menurut Korban Bencana Banjir Lumpur Lapindo Di Sidoarjo." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Diakses November 25, 2024. <https://core.ac.uk/download/pdf/160258165.pdf>.
- Arjuna, Alvi Syahrin, Edi Yunara, dan Marlina. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai." *Unnes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12564.
- Asilah, Annisa Thurfah, dan Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)." *National Conference For Law Studies*, no. Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society (2020).
- Astuti, Dyah Rahmi, dan Muhammad Yusuf Wibisono. "Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 1 (Februari 4, 2022). Diakses Januari 1, 2025. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/16882>.
- Ateng Syafruddin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justita Universitas Parahyangan Bandung* 4, no. 1 (2000): 22.
- Ayu Maharani Istiqomah dan Marlina Br Purba. "Problematisasi Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan* 21, no. 3 (2024). Diakses November 29, 2024. https://repository.ubaya.ac.id/45821/1/Marlina%20br%20Purba_Problematisasi%20Hukum%20Peran%20Notaris.pdf.
- Bima Shabartum Group. "Prinsip Dasar Geologi Pada Pertambangan." *Bima Shabartum Group*, KTBER 2024. Diakses Oktober 12, 2024. <https://bimashabartum.co.id/prinsip-dasar-geologi-pada-pertambangan/>.
- Catur Wibowo dan Herman Harefa. "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 1 (2015).
- Dini Mulia Mutmainah, Ratu Syifa Junaedi Putri, dan Ubaidillah Kamal. "Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Dan Pengelolaan Terhadap Lingkungan Hidup." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Mei 20, 2024): 383.

- Faiq Tobroni, Nurhidyatuloh, dan Nurulita Diantari. "Paradigma HAM dalam Pembatasan Organisasi Masyarakat Keagamaan Kontra Pancasila." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 02 (November 2019).
- Firmansyah, Arif. "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia." *FH UNISBA* 8, no. 1 (2012).
- Hairit, Artamin. "Dinamika Pendidikan Islam Multikultural Perspektif Lembaga Pendidikan Muhammadiyah." *Journal of Islamic Education Policy* 5, no. 1 (Juni 2020).
- Haisir Fitra Siagian. "Pro-kontra Tambang dan Komitmen Bermuhammadiyah." *Suara Muhammadiyah*. Diakses Januari 14, 2025. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/pro-kontra-tambang-dan-komitmen-bermuhammadiyah>.
- Herlambang, Embang, dan Arif Rahman Hakim. "Edukasi Pentingnya Legalitas Izin Usaha Pada UMKM Di Desa Sabajaya." *Journal UBP* 2, no. 1 (t.t.).
- Jepi Melandari. "Etika Nikomachea Dalam Perspektif Aristoteles Studi Atas Etika Manusia." Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Diakses November 25, 2024. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/9807/1/221.%20JEPI%20MELANDA RI.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/9807/1/221.%20JEPI%20MELANDA%20RI.pdf).
- Kevin Yordan Malee, Selviani Sambali, dan Grace M. Karwur. "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Lex Privatum* 9, no. 8 (2021): 122.
- Kusyanti, Lira Arimbi, dan Slamet Suhartono. "Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 12 (2024).
- Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 26, 2019): 147.
- Lestari, Syifani Ikrimahtul. "Historical Development: Kepemilikan Pengelolaan Tamban Di Masa Nabi Muhammad SAW." *Journal of Economics Business Ethic and Science of History* 2, no. 4 (Juli 2024).
- Lingga Parama Liofa dan Wisnu Aryo Dewanto. "Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi

- Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan.” *Jurnal Yustika* 26, no. 02 (2023).
- Listiyani, Nurul. “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (Juli 3, 2017): 77.
- Luh Ketut Ayu Manik Sastrini dan Ni Made Witari Dewi. “Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 2 (Januari 19, 2024): 220.
- Maulana, Rifqy, dan Jamhir. “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (Agustus 10, 2019): 90.
- Melky Bujani, Fransiscus Tangkudung, dan Marthin Lambonan. “Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseran Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 7.
- Merriam Webster. “Distributive Justic.” Dictionary. Diakses November 25, 2024. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/distributive%20justice>.
- Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, dan Donna O. Setiabudhi. “Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan.” *Lex Privatum* 9, no. 7 (2021): 6.
- Mukti, Alan. “Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi.” Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.
- Mulyawan Subawa, I Made. “Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submitin-Risk Based Approach (OSS-RBA) Dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 7, no. 1 (Februari 29, 2024): 8–17.
- Murtafiah, Nurul Hidayati, dan Ismun Ali. “Implementasi Teori Organisasi Berbasis Nilai Spiritual Islami dalam Praktik Pendidikan.” *Journal on Education* 5, no. 4 (Maret 2, 2023). Diakses Januari 1, 2025. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2024>.
- Murtiyani, Siti, Dwi Cndro Trin, Hery Sasono, Hanfah Zahra. “Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara).” *Media Syari'ah* 17. 1 (2015).

- Nasution, Lukman, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom Tp Siregar. "Sosialisasi Peran Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 1, no. 2 (Oktober 1, 2022). Diakses Januari 1, 2025. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/183>.
- Nendissa, Reny Heronia. "Legalitas Peremponang atau Muhabet Sebagai Organisasi Kemasyarakatan." *SASI* 25, no. 2 (Desember 2019): 173.
- Nur Fadilah. "Penerapan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping) (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang)." *Tamsil* 05, no. 3. Jurnal Novum (2018).
- Nur Lailatul Musyafa'ah. "Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam." *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2012).
- Oluf Langhelle. "Sustainable Development and Social Justice: Expanding the Rawlsian Framework of Global Justice." *Environmental Values* 9, no. 3 (2000).
- Pardede, Marulak. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (Maret 28, 2018): 14.
- Prastika, Amanda, Mutiara Fajriatul Izza Putri, dan Viorelia Nabila Tasya. "Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan 'Keagamaan' di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024." *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (Juli 24, 2024). Diakses Oktober 13, 2024. <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/216>.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024). Diakses November 25, 2024. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/610/388/4467>.
- Prawiranegara, Khalid. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (Juli 1, 2021). Diakses Januari 5, 2025. <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20453/pdf>.
- Pujiaty, Epy, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 2 (2022).

- Putu Indah Savitri. "Menteri Bahlil: Muhammadiyah positif dapat jatah tambang eks Adaro." Berita. *ANTARA News Bengkulu*. Diakses Januari 12, 2025. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/389326/menteri-bahlil-muhammadiyah-positif-dapat-jatah-tambang-eks-adaro>.
- Rahman, Abdul, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, dan Irwan Tahir. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (September 27, 2023): 1461.
- Rahman, M Taufiq. "Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif Dalam Pemikiran Sayyid Qutb." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (Juni 11, 2022): 211–216.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Syalaisha Amani Puspitasari. "Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan." *Jurnal Surya Kencana Dua* 11, no. 1 (2024).
- Saputera, Abdurrahman Adi. "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (Juni 21, 2021): 41–60.
- Satriawan, Desman Diri. "Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (Desember 23, 2021): 123–133.
- Setiawan, Arif. "Potensi Cadangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia Dan Dunia." *INTAN: Jurnal Penelitian Tambang* 1, no. 1 (2018).
- Sihaloho, Erika Evania, Mujiati Nur Istiqomah, dan Yolanda Adelia. "Penegakan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Daerah Pertambangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI)." *Yustisi, Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2023).
- Siregar, Anwar Habibi. "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (Desember 1, 2014). Diakses Oktober 12, 2024. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1375>.
- Sodikin. "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya." *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 119.
- Sri Pujianti. "Ahli Pemerintah Jelaskan Kapasitas Ormas Keagamaan Kelola Tambang." Berita. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Oktober 30,

2024. Diakses Januari 12, 2025. <https://testing.mkri.id/berita/ahli-pemerintah-jelaskan-kapasitas-ormas-keagamaan-kelola-tambang-21771>.

Suryani, Nilma, dan Hafiza Yetti. “Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kota Jambi.” *Unnes Law Review* 7, no. 1 (September 2024).

Trinanda, Desip. “Hak Asasi Manusia dan Perppu Ormas (Analisis Perlindungan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah).” *Ijtihad* 36, no. 2 (2020).

Utari Pradini dan Sisi Amalia. “Kajian Literatur Konsep Islam Mengenai Energi Dan Sumber Daya Mineral di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* 1 (2023).

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam. “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2021): 336.

Wafi Dinilhaq dan Zul Azhar. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Degradasi Lingkungan di Indonesia.” *Media Riset Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (Februari 2, 2024): 10.

Wibisana, Andri Gunawan. “Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan.” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (September 30, 2017): 292.

Widyaningrum, Tuti, dan Muhammad Rifqi Hamidi. “Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia.” *IBLAM: Law Review* 4, no. 3 (September 10, 2024). Diakses Januari 5, 2025. <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/436/363/1986>.

Yustizar dan Muhajir. “Eksistensi Ormas Islam Dalam Membendung Faham Radikalisme Dan Intoleransi Berbangsa Dan Bernegara Di Kota Langsa.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (April 23, 2021). Diakses Januari 1, 2025. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2778>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 285.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara

WEBSITE;

CNN Indonesia. “Daftar 6 Lahan Tambang Jatah Ormas Agama, NU Dapat Bekas Grup Bakrie.” *Ekonomi*. Diakses Januari 12, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240610093713-85-1107855/daftar-6-lahan-tambang-jatah-ormas-agama-nu-dapat-bekas-grup-bakrie>.

Diki Mardiansyah. “NU Bentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara untuk Kelola Tambang.” *Industri*. Diakses Januari 12, 2025.

<https://industri.kontan.co.id/news/nu-bentuk-pt-berkah-usaha-muamalah-nusantara-untuk-kelola-tambang>.

Fuji E Permana dan Silvy Diah Setiawan. “Mengapa Muhammadiyah Akhirnya Menerima Tawaran Kelola Tambang? Ini Penjelasan Haedar Nasir.” *Republika Online*. Diakses Januari 14, 2025. <https://republika.co.id/share/shbw37409>.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. “PP 25/2024: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.” Juli 2024. Diakses Desember 16, 2024. <https://jdih.maritim.go.id/berita/pp-252024-perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara>.

Kementerian Agama RI. “Al-Qur’an Kemenag.” Diakses Januari 21, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=159&to=200>.

klikpajak, dan Mekari Klikpajak Editorial. “Mengenal Izin Usaha Pertambangan (IUP).” *Mekari Klikpajak*. Juli 19, 2024. Diakses Oktober 12, 2024. <https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/>.

M. Nasar, Fuad. “Ormas Keagamaan Benteng Keutuhan Bangsa.” <https://kemenag.go.id>. Diakses Oktober 12, 2024. <https://kemenag.go.id/opini/ormas-keagamaan-benteng-keutuhan-bangsa-4j7wW>.

Media, Kompas Cyber. “Jadi Ormas Pertama, Ini Alasan PBNU Ajukan Izin Kelola Tambang Ke Pemerintah.” *KOMPAS.com*. Diakses Januari 8, 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/07/123000565/jadi-ormas-pertama-ini-alasan-pbnu-ajukan-izin-kelola-tambang-ke-pemerintah>.

“Muhammadiyah Resmi Terima Izin Usaha Tambang yang Ditawarkan Pemerintah.” *KOMPAS.com*. Diakses Januari 14, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/28/13383291/muhammadiyah-resmi-terima-izin-usaha-tambang-yang-ditawarkan-pemerintah>.

“MK Tolak Permohonan Uji Konsesi Prioritas Tambang untuk Ormas.” Berita. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Januari 3, 2025. Diakses Januari 12, 2025. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22025>.

“Penjelasan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI Soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Desember 13, 2024. Diakses Januari 12, 2025. <https://testing.mkri.id/berita/penjelasan-pbnu-pgi-kwi-dan-phdi-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-21956>.

Tiara Aliya Azzahra. “Pernyataan Lengkap PP Muhammadiyah Resmi Terima Kelola Tambang.” Berita. *detikNews*. Diakses Januari 14, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7461285/pernyataan-lengkap-pp-muhammadiyah-resmi-terima-kelola-tambang>.

“Alasan PBNU Terima Izin Tambang.” *Tempo*. Juni 6, 2024. Diakses Januari 8, 2025. <https://www.tempo.co/politik/alasan-pbnu-terima-izin-tambang--51764>.

“Hadits tentang rumput dengan Terjemah Bahasa Indonesia | arina.id.” *Kitab Hadits Online Arina*. Diakses Januari 22, 2025. <https://hadits.arina.id/search>.

“NU, Muhammadiyah, PGI Menanggapi Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan.” *BBC News Indonesia*. Diakses Oktober 12, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A